

Widya Priyahita & Ulya Niami Efrina Jamson<sup>▲</sup>

## **Mengukur Keterwakilan Politik Remaja: Refleksi Atas Kasus Yogyakarta**

### *Abstract*

*Political representation is reflected in statement, taking side, symbolization, and action carried out by political actors on behalf of constituents' interests, a kind of political aid/support, in the process of public policy making. The topic of political representation covers five components, namely, the context, who are represented, what are represented, those who represent, and the strategy used to optimized the political representation. These five components are the focus of the analysis of the article on the case of Youth Forum of Yogyakarta and its patron PKBI of Yogyakarta.*

*The context is the local democracy, regional autonomy, special status of Yogyakarta, and its impacts to the position of the youth; those who are represented are 14% of Yogyakarta's population at the age of 15-24 years old which totalled 3.225.400 persons in 2009 who are at the beginning phase of political consciousness formation; things represented are opinions, aspirations, perspectives, outlooks, interests/needs of the youth as reflected in policy products; those who represent are the local parliament institution, members of local parliament as reflected in political attitudes and actions of delegates and trustees, five political parties with majority votes in local parliament as reflected in their platforms, attitudes, and actions of their provincial branches' leadership, and other actors such as NGO's, mass media, etc; and the strategy used to guarantee the optimization of political representation carried out through the actions of peer educator and peer delegator in forms of strengthening the capacity to self organization and collective actions.*

*(Keywords: political representation (context, who are represented, what are represented, who represent, and strategy used), and the process of public policy making)*

### **Pengantar**

Perwakilan politik adalah aktivitas yang dapat menghadirkan kembali suara, opini, gagasan, perspektif, maupun cara pandang rakyat (warga negara) dalam proses pembuatan kebijakan publik. Perwakilan politik terjadi ketika aktor politik berbicara, membela, menandakan (*symbolized*) dan bertindak atas nama atau demi kepentingan pihak lain dalam sebuah arena politik. Singkatnya perwakilan politik adalah sejenis bantuan politik.<sup>1</sup>

Pembahasan mengenai perwakilan politik kelompok sosial tertentu menjadi penting diangkat ketika kelompok tersebut tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk diakomodasi kepentingannya dan/atau terjadi proses pengabaian.

---

<sup>▲</sup> Kedua penulis adalah mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, UGM, Yogyakarta, angkatan 2005.

<sup>1</sup> Hanna Fenicle Pitkin, *Concept of Representation*, Berkeley, University of California, 1967 dalam Nur Azizah, Peta Pemikiran tentang Perempuan dan Politik, Program S3 Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Politik, tidsk dipublikasikan, 2008, hlm. 77

Setidaknya pembahasan mengenai perwakilan politik menyangkut lima komponen kunci berikut. *Pertama*, dalam sebuah *setting/tatanan/konteks* seperti apa (proses) perwakilan tersebut berlangsung?; *Kedua*, siapa yang diwakili?; *Ketiga*, apa yang diwakilkan?; *keempat*, siapa yang mewakili?; serta, *kelima*, bagaimana strategi yang digunakan untuk menjamin optimalitas perwakilan?

Tulisan ini bermaksud menjawab lima pertanyaan tersebut dengan spesifikasi kasus keterwakilan politik remaja dalam lingkup Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) rentang waktu 2004-2009. Bagaimanakah dinamika relasi antar aktor? Bagaimanakah derajat keterwakilan politik? Juga, bagaimanakah strategi (pemberdayaan) yang (telah, sedang, dan akan) dilakukan guna meningkatkan derajat keterwakilan politik mereka?

*Pertama*, dalam sebuah *setting/tatanan/konteks* seperti apa (proses) perwakilan tersebut berlangsung?'. Pada poin pertama ini, kami akan mengelaborasi kondisi sosial politik Propinsi DIY. Menyangkut demokrasi lokal, otonomi daerah, dan (status) keistimewaan yang disandang. Bagaimanakah dampak dan posisi remaja di dalamnya?

*Kedua*, 'siapa yang diwakili?'. Yaitu remaja Yogyakarta. Maksudnya adalah penduduk dalam rentang usia 15-24 tahun. Dengan prosentase 14% dari total penduduk 3.225.400 jiwa pada tahun 2009, kita dapat membacanya sebagai satu kelompok warga negara berjumlah (cukup) besar; memiliki kebutuhan sesuai karakteristiknya yang *khas*; dimana berada pada fase awal pembentukan kesadaran politik. Dengan demikian secara umum sensitivitas dan pengetahuannya akan kepentingan politik relatif minim. Akibatnya kemudian, muncul potensi yang pada banyak kasus mewujud, yaitu terjadi pengabaian pemenuhan kepentingan yang menjadi haknya. Atau bahkan menjadi objek komodifikasi politik seperti pada momen pemilu dan pilkada.

*Ketiga*, 'apa yang diwakilkan?'. Bentuknya sebagaimana disebutkan di atas adalah opini, aspirasi, perspektif, cara pandang, kepentingan, atau pun kebutuhan *khas* remaja Yogyakarta, yang membedakannya dengan kelompok sosial lain. Kami akan menyajikan sejumlah indikator yang digunakan dalam melakukan review produk-produk kebijakan.

*Keempat*, 'siapa yang mewakili?'. Aktor-aktor yang akan disorot, yaitu: 1) Institusi DPRD Propinsi DIY dengan melakukan review produk kebijakan yang dihasilkan (perda); 2) individu anggota parlemen DPRD Propinsi DIY dengan melakukan review sikap dan aksi politik mereka baik sebagai utusan (*delegate*) atau pun wali amanah (*trustee*); 3) lima partai politik dengan jumlah kursi terbesar di DPRD Propinsi DIY. Kami akan melakukan pembacaan platform sekaligus sikap dan aksi politik DPW Propinsi kelima partai tersebut; serta, 4) Aktor-aktor lain seperti LSM, Media Massa, dan lembaga lainnya.

*Kelima*, 'bagaimana strategi yang digunakan untuk menjamin optimalitas perwakilan?'. Upaya untuk meningkatkan derajat keterwakilan politik remaja di DIY dilakukan melalui strategi pemberdayaan oleh berbagai pihak. Remaja tidak (hanya) dilihat sebagai objek yang pasif, namun kelompok potensial yang dapat ambil bagian dalam pengembangan kehidupan sosial politik kemasyarakatan. Secara umum kami mengklasifikasi strategi pemberdayaan menjadi dua bagian. 1) Penguatan kapasitas, yakni bagaimana remaja mengorganisasi diri, meningkatkan kesadaran, dan pengetahuan politik; 2) aksi kolektif, bila yang pertama orientasinya lebih bersifat internal, maka aksi kolektif

yang dimaksud yaitu bagaimana remaja bersuara baik untuk kepentingan dirinya maupun yang bersifat umum. Objek kaji yang kami pilih adalah *Youth Forum* DIY dengan lembaga patron PKBI Propinsi DIY. Organisasi ini telah lebih dari tiga tahun eksis, bersifat inklusif, dan dengan program-program berkelanjutan yang sistematis. Misalnya *hearing* rutin ke DPRD serta masifikasi isu remaja seperti kesehatan reproduksi, bahaya narkoba, perkelahian, pemerataan pendidikan, dsb. Konsep yang digunakan adalah pendidik dan delegasi sebaya (*peer educator & peer delegator*). Kami akan melihat keduanya sebagai bagian dari strategi optimalitas perwakilan politik remaja.

## **Latar (Politik) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

### **1. Profil DIY**

Yogyakarta berdiri sejak tahun 1755 berdasarkan perjanjian Gianti (Palihan Nagar), yang membagi Mataram atas 2 kerajaan yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Disebut Ngayogyakarta Hadiningrat karena menurut Babad Gianti, nama ini diberikan oleh Paku Buwono II (Raja Mataram tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama Pesanggrahan Gartitawati. Yogyakarta berarti Yogya yang kerta (makmur), sedangkan *Ngayogyakarta Hadiningrat* berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Banyak sebutan yang diberikan untuk DIY, khususnya Kota Yogyakarta, yaitu Kota Perjuangan, Kota Kebudayaan, Kota Pariwisata dan Kota Pelajar/Pendidikan.<sup>2</sup>

Secara administratif DIY terbagi dalam 5 wilayah daerah tingkat II, yaitu: Kotamadya Yogyakarta dengan luas 32,5 km<sup>2</sup>, Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km<sup>2</sup>, Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km<sup>2</sup>, Kabupaten Kulonprogo dengan luas 586,27 km<sup>2</sup>, dan Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 km<sup>2</sup>.

Provinsi DIY yang merupakan provinsi terkecil kedua di Indonesia dengan Penduduk DIY tercatat sebanyak 3.220.808 jiwa (Susenas, BPS, 2004) dengan persentase yang hampir berimbang antara penduduk perempuan dan laki-laki yaitu masing-masing sebesar 50,81% dan 49,19%. Jumlah total pemilih pada pemilu 2009 sebanyak 2.746.032 orang.

### **2. Dinamika Politik Lokal**

Dalam era demokrasi dan otonomi daerah, terkandung makna di balik transfer kekuasaan dari pusat ke daerah, desentralisasi dimaksudkan untuk membawa negara lebih dekat pada rakyat lokal (World Development Report, 1997; Axel Hadenius, 2003) dan membangun demokrasi lokal (BC Smith, 1985; James Manor, 1999; Larry Diamond, 2003). Di Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi lokal (akuntabilitas, transparansi, representasi, dan partisipasi) tertuang secara gambalang dalam kerangka regulasi, yang semua itu dimaksudkan sebagai fondasi bagi pencapaian tujuan normatif desentralisasi, yakni kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup> Tata kelola pemerintahan yang efektif dan prinsip-prinsip

---

<sup>2</sup> Diolah dari berbagai sumber.

<sup>3</sup> Sutoro Eko. Daerah Budiman: Prakarsa dan Inovasi Lokal Membangun Kesejahteraan. IRE's Insight Working Paper/Eko/III/February/2008.

demokrasi lokal di atas merupakan prinsip-prinsip yang dibangun di atas fondasi sistem sosial masyarakat modern. Hal ini tertuang dalam visi dan misi Pemerintahan Provinsi DIY.<sup>4</sup>

Dalam wacana keistimewaan DIY, sesungguhnya secara historis, upaya yang dilakukan pemerintah Kasultanan dan Kadipaten pakualaman sebagaimana dibuktikan sejarah masing-masing, paralel dengan model besar penciptaan tata pemerintahan yang efektif dalam rangka kesejahteraan dan ketentraman warga.<sup>5</sup> Pada ranah kebudayaan, Yogyakarta memiliki tradisi mengutamakan nilai-nilai kerakyatan. Konsep manunggaling kawulo gusti maupun tahta untuk rakyat bisa diinterpretasikan sebagai gagasan yang menyatakan bahwa kekuasaan raja pada dasarnya merupakan amanat yang ditujukan untuk kemaslahatan rakyat.<sup>6</sup>

Kondisi masyarakat sipil (civil society) daerah juga sangat berpengaruh terhadap dinamika politik lokal. Masyarakat sipil mencakup arena publik, organisasi, dan gerakan lokal yang mempunyai kekuatan modal sosial dan partisipasi (voice, akses, dan kontrol), sehingga ia menjadi fondasi yang kuat bagi tumbuhnya daerah yang mandiri, demokratis, inklusif, pluralis, dan sejahtera. Secara garis besar peran masyarakat sipil dalam konteks demokrasi lokal terletak pada pendidikan politik, perluasan ruang publik dan gerakan organisasi masyarakat sipil. Apa yang dibutuhkan untuk suatu demokrasi yang kokoh adalah gerakan sosial, organisasi-organisasi berbasis massa dan berbasis komunitas serta pimpinan lokal yang sejati dengan ikatan serta memiliki tanggung jawab terhadap rakyat akar rumput. Ini hanya dapat dicapai melalui komunitas yang hidup (Hans Antlov, 2004).<sup>7</sup>

Di Yogyakarta, terdapat lebih dari 20 *Non Government Organizations* (NGO) yang aktif melakukan advokasi; banyaknya media massa cetak mulai dari Kompas, Kedaulatan Rakyat, Bernas, Harian Jogja, dan sebagainya, maupun lembaga pers mahasiswa; Terbukanya akses atas media elektronik dan internet; Banyaknya penerbit; Komunitas-komunitas; Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta; dan Lembaga budaya.<sup>8</sup>

Kondisi DI Yogyakarta yang berangkat ke arah demokratisasi seperti disebutkan di atas, menciptakan situasi yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik para warga termasuk remaja di dalamnya sebagaimana yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

---

<sup>4</sup> Visi pembangunan daerah Propinsi DIY, yaitu terwujudnya pembangunan regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sebagai pusat pendidikan, budaya dan Daerah tujuan wisata terkemuka, dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin didukung oleh nilai-nilai kejujuran dan pemerintah yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan. Sedangkan dasar filosofi pembangunan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Website Pemprov.

<sup>5</sup> Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY versi 07 Juni 2007, pukul 14.00 WIB, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM, 2007, hlm. 42

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 50

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Di provinsi ini berjumlah 178 lembaga terdiri dari yayasan, organisasi, lembaga pendidikan, instansi pemerintah serta organisasi yang melestarikan nilai budaya daerah. Pembentukan lembaga ini dalam rangka mengikuti perubahan yang sangat cepat dan tidak diimbangi dengan kesiapan budaya bangsa dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman dan damai, untuk itu pemerintah provinsi melalui potensi dan sumber budaya yang dimiliki mengolah budaya setempat sebaik mungkin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Sumber: [www.bapedda-di.com](http://www.bapedda-di.com).

## **Remaja Yogyakarta sebagai Kelompok Kepentingan**

### **1. Ruang lingkup**

Istilah remaja bisa dilihat dari empat sisi: fisik, mental, sosial-budaya, dan ekonomi.<sup>9</sup> Penggunaan istilah remaja memiliki makna yang berbeda-beda dari satu negara dengan yang lain tergantung dari faktor politik, ekonomi dan sosio-budaya setempat. PBB mendefinisikan remaja dalam 3 klasifikasi umur (UNFPA, 2005): 1) *Adolescent* : 10 – 19 tahun; 2) *Youth* : 15 – 24 tahun; 3) *Young People* : 10 – 24 tahun.

Menurut data Badan Pusat Statistik Propinsi DIY, jumlah remaja usia 15-19 di DIY pada tahun 2006 sebesar 192.534 ribu, atau 7,2% dari total penduduk. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik Pusat dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, periode 200-2006, 65 juta atau 28,64% penduduk Indonesia adalah usia remaja.

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, sedari dulu sampai sekarang. Dengan menyandang predikat ini, tidaklah mengherankan manakala terdapat banyak sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama di kota Yogyakarta, termasuk SMA negeri dan swasta. Menurut data, di Kota Yogyakarta sedikitnya terdapat 49 SMA, terdiri dari tahun 11 unit SMA Negeri dan 38 unit SMA Swasta, dengan jumlah kelas 629 kelas, 209 di SMA Negeri dan 417 kelas di SMA Swasta.

Perubahan sosial yang terjadi seiring dengan bergantinya zaman tak dapat dipungkiri turut mempengaruhi kondisi sosial remaja di DIY. Dewasa ini remaja kian kritis dalam menghadapi fenomena yang terjadi lingkungan sekitarnya.

### **2. Kompleksitas Problematika dan Isu Remaja**

Dr Peter Xenos dari East-West Center, Hawaii, AS, menyatakan bahwa saat ini di berbagai negara Asia terjadi situasi "pembengkakan jumlah kaum muda" (*youth bulge*), mirip dengan *baby boom* atau kelahiran banyak bayi di AS sesudah Perang Dunia II. Penyebab *youth bulge* di Asia adalah menurunnya tingkat kelahiran dan kematian bayi selama satu-dua dekade terakhir. Tertundanya perkawinan dan lebih lamanya masa pendidikan telah memperpanjang periode remaja/muda (*adolescence*) yaitu dari pubertas hingga perkawinan sampai delapan-sembilan tahun atau bahkan lebih lama lagi.<sup>10</sup>

Interaksi yang intensif ini juga disertai oleh fenomena yang disebut *peer pressure* atau tekanan teman sebaya. Kita tentunya bisa merasakan betapa besar pengaruh teman

---

<sup>9</sup> Remaja sering didefinisikan sebagai masa transisi dari anak-anak menuju masa dewasa. Masa itu mencakup sekian perubahan pada beberapa aspek seperti aspek biologis, mental, dan sosio cultural. WHO mendefinisikan masa remaja sebagai sebuah perkembangan karakteristik seksual sekunder menuju pada pematangan alat reproduksi, perkembangan proses mental dan identitas meja dan merupakan transisi dari ketergantungan social-ekonomi menuju kadaan yang relative mandiri (WHO, 1975 cited in Population Reports, 1995: 3). Secara biologis, seseorang yang sudah mengalami masa pubertas akan dengan serta merta dikatakan sebagai remaja. Karena batas untuk mengakhiri masa remaja tidak begitu jelas, maka beberapa factor social terkadang dijadikan ukuran berakhirnya masa remaja menuju masa dewasa. Faktor social ini antara lain pernikahan, pekerjaan, dan karenanya kemandirian secara ekonomi. Pada kenyataannya, seseorang akan dikatakan sesudah dewasa kebanyakan dengan ukuran perkawinan.

<sup>10</sup> (Guntoro Utamadi, PKBI Pusat/Irwan Julianto, dari Taipei, Taiwan).  
<http://www.geocities.com/guntoroutamadi/artikel-remaja-asia-beresiko.html>

sebaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari cara berbicara, berpakaian, sampai bertingkah laku, kita tidak hanya mengikuti apa yang diajarkan dan diarahkan oleh orang tua di rumah, tetapi juga memperhatikan dan mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-teman sebaya.

Perkembangan identitas merupakan isu krusial pada masa remaja sebagai dasar bagi masa dewasa. Erikson mengatakan bahwa perkembangan identitas pada masa remaja sangat berpengaruh pada masa depan, peran-peran masa dewasa dan sistem keyakinan pribadi. Menurut James Marcia dan Waterman (*Anita E. Wookfolk, 1995*), identitas diri merujuk kepada pengorganisasian atau dorongan, kemampuan, dan keyakinan ke dalam citra diri secara konsisten yang meliputi kemampuan memilih dan mengambil keputusan, baik menyangkut pekerjaan, orientasi seksual, dan filsafat hidup.

Berkaitan dengan kompleksitas isu remaja, berikut ini adalah *Youth Development Indicators* UNFPA yang secara kuantitatif dapat digunakan dalam melakukan *review* hasil dari kebijakan pemerintah.<sup>11</sup>

Tabel 1. Indikator UNFPA menurut Bidang

No	Bidang	Indikator
1.	Pendidikan	Angka buta huruf pada remaja (Angka partisipasi sekolah) <sup>12</sup>
2.	Ketenagakerjaan	Angka pengangguran remaja, perbandingan pengangguran usia remaja dan dewasa, perbandingan remaja yang bekerja dengan populasi.
3.	Kemiskinan dan kelaparan	Tingkat gizi remaja <sup>13</sup> , jumlah remaja yang hidup dalam kondisi miskin (absolut).
4.	Kesehatan	Fertilitas remaja, kesehatan reproduksi, <sup>14</sup> angka kematian remaja perempuan/ ibu, angka harapan hidup pada remaja sebelum berusia 25 tahun.
5.	Lingkungan	Persentase ketersediaan air bersih, sanitasi, tempat tinggal bagi penduduk usia remaja.
6.	Penyalahgunaan Narkoba	Angka/ prevalensi penyalahgunaan Narkoba oleh remaja <sup>15</sup>
7.	Partisipasi	Usia memilih untuk pertama kalinya, hukum yang mengatur usia minimum pernikahan remaja, keberadaan lembaga perwakilan remaja di tingkat nasional. <sup>16</sup>

<sup>11</sup> <http://www.un.org/esa/socdev/unyin/youthindicators1.htm>

<sup>12</sup> Angka Partisipasi sekolah menurut kelompok umur di DIY: 7-12 tahun (99,35%); 13-15 tahun (90,55%); 16-18 tahun (71,18%); 19-24 tahun (39,71%)

<sup>13</sup> Menurut WHO Regional Office SEARO (2002), salah satu masalah gizi remaja putri di Asia Tenggara adalah anemia defisiensi zat besi yaitu kira-kira 25 - 40 % remaja putri menjadi korban anemia tingkat ringan sampai berat; Survey Diesmurni (2005) menunjukkan bahwa prevalensi anemia remaja putri di SMA Kota Yogyakarta sebesar 54,59 %

<sup>14</sup> Dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku seksual pada remaja ini mempunyai korelasi dengan sikap remaja terhadap seksualitas. Data Konseling KTD PKBI DIY tahun 2007 usia SMP sampai Perguruan Tinggi menunjukkan angka 523. 12,4 % remaja SMA mengaku sudah melakukan hubungan seks (PKBI, 2006)

<sup>15</sup> Tim Investigasi NAPZA anggota DPRD (2000) menyatakan 60% mahasiswa di Yogyakarta mengkonsumsi obat terlarang tersebut, ditambahnya lagi dari mahasiswa tersebut 40% adalah mahasiswa pendatang, atau tempat asalnya bukan Yogyakarta. Dari 60% itu dengan komposisi 19,8 ton ganja, 685 gram shabu-shabu, 62 gram putauw, 1.666 ekstasi dan 2.715 pil koplo

8.	Teknologi informasi dan komunikasi	Akses remaja untuk memanfaatkan komputer dan internet.
9.	HIV-AIDS	Prevalensi HIV di remaja, tingkat pengetahuan remaja akan HIV-AIDS. <sup>17</sup>
10.	Konflik bersenjata dan trafiking	Jumlah remaja yang menjadi korban/ pengungsi dalam konflik bersenjata maupun trafiking.

Sedangkan menurut pemetaan penulis, terdapat tiga karakteristik isu berdasarkan peran remaja dalam isu tersebut:<sup>18</sup>

Tabel 2. Peran Remaja berdasarkan Karakteristik Isu

No	Karakteristik Isu	Peran Remaja	Contoh
1.	Isu Umum	Terlibat aktif	Lingkungan <sup>19</sup>
2.	Isu Spesifik Remaja	Terlibat aktif	Kesehatan Reproduksi Remaja <sup>20</sup>
3.	Isu Spesifik Remaja	Tidak terlibat aktif	Trafiking anak-anak dan remaja <sup>21</sup>

### 3. Remaja sebagai kelompok kepentingan

Setiap individu maupun masyarakat memiliki kepentingan yang harus diraih dan dipertahankan bagi kelangsungan kehidupannya, baik dalam keluarga, masyarakat, negara. Dalam rangka meraih dan mempertahankan kepentingannya ini, tentu saja memerlukan kerja keras, perjuangan yang semuanya bersentuhan dengan individu atau masyarakat, maupun pihak yang lebih luas yaitu negara dan pihak internasional.

Kelompok kepentingan (*interest group*) adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik berdasarkan pemilihan umum, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintahan.

<sup>16</sup> Usia memilih pertama adalah 17 tahun; Terdapat UU Perkawinan yang membolehkan anak perempuan usia 16 tahun untuk menikah; Belum terdapat institusi formal semacam parlemen remaja, keberadaan Karang Taruna Indonesia dan KNPI

<sup>17</sup> kelompok umur muda (usia 15 -34 tahun) merupakan kelompok ODHA terbesar di DIY sampai Oktober 2008, yakni sebesar 44 % dari 615 ODHA.

<sup>18</sup> Tulisan ini akan membahas mengenai isu remaja dengan peran remaja yang terlibat secara aktif melalui objek kaji Youth Forum DIY

<sup>19</sup> Dalam isu lingkungan, seperti *global warming* yang marak dibicarakan secara mendunia, remaja menjadi salah satu pihak yang turut mengkampanyekan isu ini. Seperti yang dilakukan oleh *youth forum* dalam peringatan *international youth day* tahun 2008 yang mengambil tema remaja peduli lingkungan dan menggelar lomba esai remaja dengan tema *stop global warming*.

<sup>20</sup> Dalam isu kesehatan reproduksi remaja misalnya, *Youth Center* PKBI DIY yang bergelut di bidang kespro remaja, memang dikelola oleh relawan remaja, dan sebagian besar dari staf juga ada pada usia remaja. Bahkan untuk rekrutmen relawan, salah satu syarat dasar adalah berusia antara 17-24 tahun sesuai dengan rentang usia remaja yang digunakan oleh PKBI dalam gerakannya.

<sup>21</sup> Dalam kasus *trafficking*, anak dijual dan dijadikan pembantu rumah tangga, dilacurkan, dijadikan pengemis, pengedar narkoba atau dieksploitasi di tempat kerja berbahaya seperti jermal, tambang, perkebunan dan sebagainya. (Guntoro Utamadi, PKBI Pusat. <http://www.geocities.com/guntoroutamadi/artikel-remaja-dan-anak.html>.); Data *trafficking* di Yogyakarta menurut Jaringan Penanganan Korban Kekerasan yang berbasis gender dan *trafficking* tahun 2008 menunjukkan angka di bawah 10 kasus pada rentang usia 12-16 tahun.

Berdasarkan klasifikasi kelompok kepentingan ala Gabriel Almond, remaja secara umum termasuk dalam klasifikasi anomik. Yaitu kelompok yang terbentuk dinatara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika, dan arena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, maka kelompok ini sering tumpang tindih dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non konvensional, seperti demonstrasi, unjuk rasa, dll. Sedangkan kelompok-kelompok remaja yang terlibat dalam aksi perwakilan politik entitasnya klasifikasi disesuaikan dengan karakteristik yang melekat pada dirinya<sup>22</sup>.

Akan tetapi, ketika kita membincang mengenai *Youth Forum DIY*, sesungguhnya dapat dikategorikan dalam kelompok kepentingan yang bersifat non asosiasional. Sebagai sebuah kelompok kepentingan, mereka memiliki tujuan, struktur, dan isu yang jelas serta berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di samping itu *youth forum* juga menyampaikan aspirasinya melalui jalur-jalur intermediasi dalam pola perwakilan alternatif.

Belajar dari kasus DIY, upaya untuk meningkatkan derajat keterwakilan politik remaja dilakukan melalui strategi pemberdayaan oleh berbagai pihak. Remaja tidak dilihat sebagai objek yang pasif, namun kelompok potensial yang dapat ambil bagian dalam pengembangan kehidupan sosial politik kemasyarakatan. Secara umum kami mengklasifikasi strategi pemberdayaan menjadi dua bagian.

Awal terbentuknya Youth Forum diawali dengan adanya keinginan dari beberapa *Peer Educator* (PE) di SMA, kemudian sejalan dengan perubahan konsep pengorganisasian yang dilakukan *Youth Center* PKBI DIY, maka terbentuklah Youth Forum DIY pada tahun 2005.

Dalam perkembangannya, diawali dengan penguatan *peer educator* yang berada di lebih dari 20 SMA di DIY melalui regenerasi PE. Upaya awal yang dilakukan adalah optimalisasi peran PE yang ada di masing-masing sekolah agar mampu menunjukkan eksistensi mereka, baik sebagai konselor di sekolah bersama guru BK maupun menghidupkan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang ramah remaja di sekolah.

Setelah penguatan internal PE, mereka mulai bergerak bersama dan mengorganisir diri, untuk melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah termasuk dalam perjuangan identitas remaja. Basis advokasinya adalah berdasarkan 12 Hak Kesehatan Reproduksi:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Secara utuh, Almond mengklasifikasi kelompok kepentingan menjadi empat. Dimana ketiga yang lain yaitu sebagai berikut: 1) kelompok non asosiasional, termasuk kategori masyarakat awam dan kegiatannya bersifat temporal. Wujudnya seperti: kelompok keluarga, keturunan etnik, jaringan para pemimpin agama, dll. 2) kelompok istitusional, yakni kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, fungsi serta sebagai artikulator kepentingan. 3) kelompok asosiasional, adalah kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasi kepentingannya kepada pemerintah dan atau pemodal. Contohnya, serikat buruh, paguyuban, kadin, MUI, NU, Muhammadiyah, dll.

<sup>23</sup> 12 Hak Kesehatan Reproduksi (International Conference on Population and Development, 1994) hak reproduksi, yang merupakan bagian dari hak azasi manusia. Hak ini dibahas dalam Konferensi Dunia tentang Hak-hak Azasi Manusia (1993), Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (1994), Konferensi Internasional tentang Perempuan (1995) dan masih banyak lagi. IPPF (*International Planned Parenthood Federation*) yang merupakan organisasi keluarga berencana dan kependudukan terbesar di dunia secara khusus membuat rencana kerja penerapan hak reproduksi ini yang akan diterapkan di semua negara di dunia yang menjadi anggota. Di Indonesia, upaya memberikan perlindungan hak-hak reproduksi bagi masyarakat sudah menjadi kebijakan nasional, Menurut Pedoman Kebijakan Teknis Upaya



Tabel 3. Basis Hak yang Diperjuangkan Youth Forum DIY

No	Basis Hak	Isu yang diperjuangkan
1.	<i>Hak untuk memperoleh informasi dan pendidikan</i>	Pendidikan kesehatan reproduksi masuk muatan lokal
2.	<i>Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan</i>	Pelayanan kesehatan yang ramah remaja
3.	<i>Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi</i>	Persamaan hak pendidikan bagi siswi yang mengalami kehamilan tidak diinginkan
4.	<i>Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik</i>	Pelibatan remaja dalam kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan remaja.

Youth Forum DIY dibagi dalam beberapa tim yaitu: *tim media*, *tim kampanye*, *tim lobby*, dan *tim riset*. Tim media akan bekerja pada wilayah pembuatan media seperti buletin. Tim kampanye yang nantinya akan melakukan kampanye publik melalui orasi dan kegiatan-kegiatan. Tim lobby akan membuat konsep dan negosiasi untuk *hearing* serta audiensi. Sedangkan tim riset, akan melakukan penelitian sederhana di tiap sekolah seputar kebutuhan remaja dan kaitannya dengan Kesehatan Reproduksi Remaja. *Youth Forum DIY* juga berjejaring dengan organisasi remaja lain seperti Forum Komunikasi Pengurus OSIS (FKPO) DIY, Palang Merah Remaja (PMR), Pramuka, dan Organisasi Berbasis Komunitas Remaja Jalanan (bernama *Minority*), yang sejak tahun 2007 mulai aktif melakukan advokasi berupa *hearing* ke DPRD dan melakukan aksi yang diorganisir oleh PKBI DIY.

Kegiatan *Youth Forum DIY* yang berjalan antara lain, diskusi remaja, siaran radio dan TV, kampanye publik, orasi, pembuatan buletin *mapeer*. Berbagai kegiatan juga diorganisir oleh *Youth Forum* seperti peringatan hari AIDS sedunia, *international youth day*, dan kegiatan penyebaran informasi di FKY (Festival Kesenian Yogyakarta) tiap tahunnya.

Dari sisi kebijakan hukum di Indonesia, tidak ada satupun Undang-undang yang mengakui keberadaan remaja. Yang ada di Indonesia hanyalah UU Perlindungan Anak

---

Promosi dan Pemenuhan Hak-hak Reproduksi yang disusun oleh BKKBN, perlindungan terhadap hak reproduksi ini merupakan pencerminan salah satu misi Program Keluarga Berencana Nasional, yaitu langkah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sejak dimulainya proses pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. Hak reproduksi ini berlaku bagi setiap manusia dari segala kelompok usia, ras, warna kulit, jenis kelamin, aliran politik, status ekonomi, sosial dan pendidikan tanpa pandang bulu. Sebagai konsekuensinya, remaja juga mempunyai hak reproduksi sebagaimana halnya dengan kelompok umur yang lain. Hak remaja atas kesehatan reproduksi ini mulai diakui secara internasional pada Konvensi Hak Anak tahun 1989 dan kemudian dilanjutkan pembahasannya sebagai bagian dari ICPD yang diadakan lima tahun kemudian. Sebagai tindak lanjut, hak reproduksi remaja dibahas sangat mendalam pada International Youth Forum yang diadakan di Den Haag, Negeri Belanda bulan Februari 1999 dan diikuti oleh 132 peserta remaja dari seluruh dunia. Forum ini secara khusus menekankan perlunya keikutsertaan remaja dalam seluruh kebijakan politis yang mempengaruhi kehidupan mereka, mulai dari segi desain, implementasi sampai evaluasi, serta mendesak diprioritaskannya alokasi dana dan sumber-sumber bagi kesehatan reproduksi remaja. Guntoro Utamadi, PKBI Pusat. <http://www.geocities.com/guntoroutamadi/artikel-hakreproduksi.html>

---

yang menganggap usia 0-18 tahun sebagai anak-anak. Serta UU Perkawinan yang membolehkan anak perempuan usia 16 tahun untuk menikah. Artinya kategori yang ada hanyalah anak-anak dan dewasa. Padahal, remaja, yaitu usia 10-24 tahun merupakan kelompok yang memiliki karakteristik berbeda dengan anak-anak maupun dewasa. Dalam ranah politik, remaja belum mendapatkan tempat maupun prioritas dalam proses demokratisasi di negeri ini. Seperti dalam pemilu, remaja dikategorikan sebagai pemilih pemula. Pembahasan mengenai perwakilan politik kelompok sosial tertentu menjadi penting diangkat ketika kelompok tersebut tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk diakomodasi kepentingannya dan atau terjadi proses pengabaian.

## Dinamika Keterwakilan Politik Remaja Yogyakarta

### 1. Konseptualisasi Keterwakilan

Dalam konseptualisasi keterwakilan, terdapat empat cara pandang yaitu *Formalistic Representation* yang melihat perwakilan dari sisi *authorization* (proses rekrutmen seorang anggota dewan) dan *accountability* (pertanggungjawaban anggota dewan). Namun dalam keterwakilan formal tersebut memiliki kelemahan. Maka Hannah Pitkin (1967) mengajukan tiga konseptualisasi alternatif yaitu: *Symbolic Representation*, *Descriptive Representation*, dan *Substantive Representation* yang diperinci dalam tabel berikut ini.<sup>24</sup>

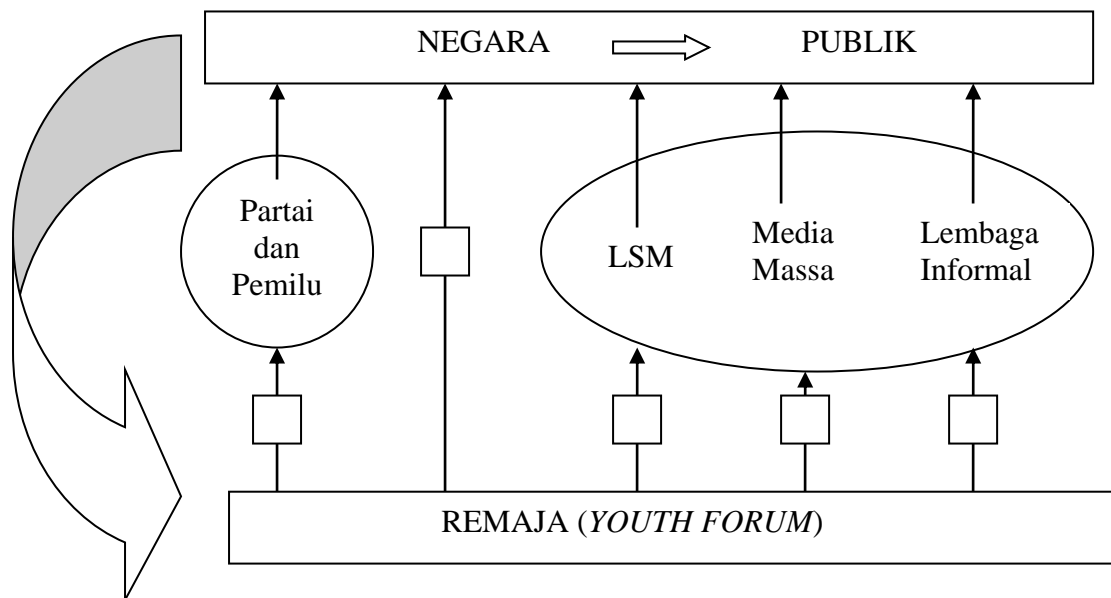
Tabel 4. Konseptualisasi Keterwakilan

Konseptualisasi	Gambaran Singkat	Pertanyaan Utama	Standar Untuk Mengevaluasi wakil	Aktor/ yang bertindak sebagai wakil
<i>Formalistic Representation</i>	Rekayasa kelembagaan yang mendahului dan memprakarsai perwakilan.	Apa posisi institusional dari sebuah perwakilan DPR	Tidak ada	Partai Politik-Pemilu
<i>Symbolic representation</i>	Cara-cara wakil “stand for” – berpihak kepada/ berarti – bagi yang diwakili		Wakil dinilai dari tingkat penerimaan rakyat terhadap wakil (degree of acceptance)	Kelompok informal dan media massa
<i>Descriptive representation</i>	Sejauh mana para anggota Dewan/ wakil mempunyai kemiripan dengan rakyat/ yang diwakili	Apakah wakil: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai kemiripan</li> <li>- Mempunyai kepentingan yang sama</li> <li>- Pernah mempunyai pengalaman yang sama (sehingga dapat berempati) dengan pemilih</li> </ul>	Dinilai dari akurasi kemiripan antara yang mewakili dengan yang diwakili	Ormas, Organisasi sosial religius, utusan daerah, utusan kelompok kepentingan minoritas

<sup>24</sup> Nur Azizah,

		yang diwakilinya		
<i>Substantive representation</i>	Aktivitas para anggota Dewan – tindakan-tindakan yang diambil anggota dewan apakah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- atas nama</li> <li>- untuk membela kepentingan</li> <li>- sebagai wakil</li> <li>- sebagai pengganti dari yang diwakili</li> </ul>	Apakah kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh para wakil tersebut memang dimaksudkan untuk membela kepentingan pemilih	Wakil dinilai dari, apakah hasil kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh para wakil tersebut memang dimaksudkan untuk membela kepentingan pemilih	LSM dan kelompok-kelompok advokasi

Konseptualisasi tentang perwakilan alternative menurut perluasan konsep demokrasi dan perwakilan, bukan hanya dari prosedur formal saja tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang *Symbolic Representation*, *Descriptive Representation*, dan *Substantive Representation*. Meski demikian basis legitimasi representasi alternative tidak sekuat legitimasi formal melalui Pemilu. Pola hubungan alternative antar rakyat, wakil dengan Negara dapat diilustrasikan dalam Pola hubungan remaja – wakil – Negara (Formal dan Alternatif) berikut:



Pola hubungan alternatif inilah yang akan digunakan untuk menganalisis keterwakilan remaja. Intermediasi dapat dilakukan melalui berbagai jalur:

- Partai politik menjadi wakil formal bagi remaja
- Remaja dapat langsung menyampaikan aspirasi bagi negara.
- LSM dapat menjadi wakil informal bagi remaja

d. Pemimpin dan lembaga informal lainnya juga dapat menjadi wakil informal bagi rakyat.

Terdapat perkembangan dari aktor yang dapat berperan sebagai wakil rakyat. Aktor-aktor internasional, trans nasional, lembaga-lembaga swadaya masyarakat semakin berperan penting dalam mengusulkan kebijakan publik untuk membela warganegara. Jadi mereka dapat bertindak sebagai wakil rakyat. Mereka dapat menyuarakan keinginan rakyat, bertindak atas nama rakyat, berpihak pada rakyat.<sup>25</sup>

Keterwakilan dalam konteks ini, tidak selalu merujuk pada data yang sifatnya numeral (kuantitatif), semisal kursi di parlemen, atau jumlah perda terkait yang dikeluarkan. Mainstreaming isu juga termasuk di dalamnya.

## 2. Aktor-aktor

Untuk melihat dinamika keterwakilan politik remaja di DIY, berikut akan dipetakan aktor-aktor yang berperan dalam berbagai jalur:

### a. Partai politik dan Pemilu

#### Kilas Balik Pemilu 2004

Dari 5 parpol pemenang pemilu legislatif 2004 di DIY, dapat dilihat *platform* dan bidang secara struktural yang berkaitan secara langsung maupun bersinggungan dekat dengan remaja sebagai berikut:<sup>26</sup>

Tabel 5. Bidang dan *Platform* Partai

Partai	Bidang	Ringkasan <i>Platform</i> dan Program
PDIP	Pendidikan	Mendesak pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan agar tercapai peningkatan mutu pendidikan, wajib belajar gratis sembilan tahun, memperbanyak pendidikan kejuruan di tingkat menengah dan pendidikan non formal dalam bentuk program “kerja sambil belajar”.
PAN	Pendidikan	Wajib belajar diterapkan untuk semua anak usia sekolah. PAN memberikan perhatian khusus pada usaha pemupukan generasi muda yang berkualitas agar dapat mengemban tanggung jawab masa depan bangsa. Alokasi dana pendidikan ditingkatkan agar siswa dapat dibebaskan dari biaya sekolah dan segala pungutan yang memberatkan.
Partai Golkar	Sosial budaya	Tidak terdapat program yang secara spesifik yang terdekat dengan isu remaja. Hanya pada bidang sosial budaya yang mencita-citakan penguatan budaya bangsa yang kuat, dengan pengembangan iklim yang mendukung bagi berkembangnya budaya ilmu, budaya kerja, budaya disiplin, yang berkiatn dengan pembentukan karakter bangsa.
PKB	Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa; Pendidikan	Reformasi pendidikan: pembaharuan model pembelajaran, peningkatan mutu pendidikan.
PKS	Kepeloporan Pemuda; Pendidikan	Membina pemuda sebagai pilar pembangunan bangsa dalam mengatasi masalah sosial dan moral, serta menjadikan kaum muda yang mandiri, berdaya, dan mempersiapkannya sebagai calon pemimpin bangsa.

<sup>25</sup> *Standford encyclopedia of philosophy, political representation*, <http://plato.stanford.edu>

<sup>26</sup> Bambang Setiawan, (ed), *Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004

### Konteks Pemilu 2009

Berdasarkan UU No. 10 tahun 2008 dan UU No. 42 tahun 2008, sistem pemilu yang dianut oleh Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>27</sup> 1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, dan 2) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Implikasi dari sistem baru yang dianut pada Pemilu 2009, membutuhkan sosialisasi dan pendidikan ekstra bagi pemilih tidak terkecuali pemilih pemula. Posisi remaja pada pemilu 2009 identik dengan kelompok pemilih pemula. Kelompok ini adalah pemilih yang belum memilih pada pemilu 2004, berusia 17-22 tahun pada Pemilu 2009 serta terdaftar sebagai pemilih dan memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya.<sup>28</sup>

Berbicara mengenai pemilih pemula, dari sekitar 210 juta penduduk Indonesia, 153 juta lebih diantaranya turut memberikan suara dalam pemilu tahun 2004. Diprediksi terdapat sekitar 16% pemilih pemula, atau sekitar 24 juta, dimana 60% berada di Pulau Jawa yang sebagian besar merupakan pelajar sekolah Menengah Atas (SMA).

Pada pemilu 2009, terjadi peningkatan jumlah pemilih pemula di Indonesia yaitu sebesar 24% dari total pemilih. Disamping itu, pemilih remaja yang berusia antara 17-30 tahun merupakan jumlah terbanyak di antara kelompok usia pemilih yaitu sekitar 60%. Pemilih pemula di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya sekitar 217.127 atau sembilan persen dari total jumlah pemilih yang jumlahnya 2.746.032.

Kelompok pemilih pemula seringkali dianggap tidak berpengalaman dan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memilih secara cerdas. Sehingga pemilih pemula menjadi sasaran partai politik untuk mendulang suara. Upaya yang dilakukan oleh partai politik berikut dengan asumsi partai berikut ini merupakan 5 partai pemenang pemilu 2009 di DIY dan dua partai baru yang cukup merebut perhatian pemilih di DIY.<sup>29</sup>

Tabel 6. Asumsi Partai dan Organisasinya terhadap Sikap Pemilih Pemula

Partai	Organisasi Sayap	Sikap terhadap remaja dan pemilih pemula
PDIP	Banteng Muda Indonesia, Taruna Merah Putih	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melihat pemilih pemula berpotensi mendongkrak suara.</li> <li>Generasi muda menjadi kunci membangun bangsa karena penuh ide-ide kreatif sehingga perlu didukung agar semangat dan kegigihan mereka tersalurkan secara tepat namun juga dari organisasi lain khususnya mahasiswa yang sudah eksis sebelumnya.</li> <li>Target PDI Perjuangan melalui Taruna Merah Putih. Porsinya 75 persen kader non partai.</li> <li>Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Pramono Anung dekati pemilih pemula, dengan menjadi tamu kehormatan saat para siswa SMA Pawyatan Daha, Kelurahan Balowerti, Kota Kediri pada upacara bendera.</li> </ul>
PAN	Barisan Muda PAN	Mencari simpati dan dukungan kaum muda dengan kampanye damai.
Partai Golkar	Penggalangan Khusus	Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono

<sup>27</sup> Kelompok Studi Pemilu, *Buku Pintar Pemilu*, tidak dipublikasikan, Fisipol UGM, 2009, hal. 60

<sup>28</sup> Pemilih Pemula Diincar Banyak Parpol, Embrio, edisi 28, Desember 2008, PKBI DIY, 2008, hal. 3

<sup>29</sup> Diolah dari berbagai sumber

	(Galsus) Pemilih Pemula –organisasi di bawah lembaga Bappilu –	<p>mengaku kesulitan mendapat dukungan dari pemilih pemula. Golkar terus melakukan terobosan dan pendekatan kepada mereka. Salah satunya, menyediakan calon legislatif (caleg) wajah baru sekitar 60 persen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DPP Partai Golkar akan menyiapkan metode kampanye dengan genre anak muda, seperti menggelar pertunjukan musik, membuat festival budaya dan sebagainya. Dimulai dengan berbagai diskusi yang mengetengahkan tema anak muda.</li> </ul>
PKS	<i>Justice Boys and Girls</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Barisan pemuda pelajar yang terbentuk sejak tahun 2003 bergerak untuk berperan serta dalam mengambil bagian terpenting untuk memahami pemilih pemula yang notabeneanya masih berstatus pelajar ikut aktif dalam memberikan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia.</li> <li>▪ Tanggal 23 November 2008 menyelenggarakan Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula yang bertempat di Balai Diklat Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Materi: mengenai urgensi berpartisipasi dalam politik sebagai pemilih dan diterangkan pula tentang kriteria partai yang baik untuk dijadikan sebagai pilihan dalam pemilu 2009</li> <li>▪ Grup band Nidji akan memeriahkan kampanye rapat umum pertama Partai Keadilan Sejahtera Selasa 17 Maret 2009. Nidji tampil di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, bersama juru kampanye nasional PKS, Hidayat Nur Wahid. Diharapkan kampanye ini dihadiri oleh kalangan pemilih pemula para mahasiswa dan pelajar SMA.</li> </ul>
Demokrat	Angkatan Muda Partai Demokrat; Barisan Pemuda Demokrat; Komite Nasional Pemuda Demokrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melalui lokakarya dan diskusi-diskusi yang dilakukan rutin setiap bulan, pemuda demokrat dapat menyampaikan pendapat dan masukan mengenai program partai apa yang bisa mendorong optimalisasi peran pemuda.</li> <li>▪ Rencana untuk mendirikan sekolah politik pasca pemilu 2009. bentuk sekolah tersebut adalah fisik (tempat kursus) maupun melalui seminar, lokakarya dan forum diskusi.</li> </ul>
Gerindra	Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) dan Tunas Muda Indonesia (Tidar)	Siap mendorong regenerasi kepemimpinan bangsa dan menjadi mitra pemuda dalam meningkatkan kemampuan, kapasitas, integritas, dan kenegarawanan.
Hanura	Gerakan Muda Hati Nurani Rakyat (GEMA) HANURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gerakan Muda Hati Nurani Rakyat (GEMA HANURA). Selain sebagai wadah pemuda partai yang menitikberatkan pada penggalangan pemuda dan pemilih pemula yang menjadi kader Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat), GEMA HANURA juga merupakan media resonansi partai kepada masyarakat dalam wujud karya bakti pemuda..</li> <li>▪ Secara umum orientasi kegiatan GEMA HANURA didasarkan pada 2 (dua) aspek, pertama aspek kegiatan dibidang kepemudaan partai yang meliputi : Organisasi, Kaderisasi, Penggalangan Massa dan Pemilih Pemula (Galihmula) dan yang kedua meliputi kegiatan yang menyentuh langsung pokok permasalahan dimasyarakat, antara lain bidang Pendidikan Politik, Ekonomi Kerakyatan, Kesejahteraan Sosial, Hukum, Advokasi, Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan dan Seni Budaya serta Olah raga yang di harapkan dapat bersinergi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan berdirinya Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).</li> </ul>

Pemilih pemula yang terdiri dari pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda pada dasarnya memiliki keunikan yaitu karakter idealisme (selalu berpikir hal-hal yang baik dan sebagaimana mestinya atas nama kemanusiaan dan kemajuan bangsa).<sup>30</sup> Artinya, terdapat potensi secara kuantitas dan kualitas, sehingga jangan sampai potensi ini hanya menjadi kelompok yang mendongkrak perolehan suara parpol tetapi juga harus dibarengi dengan upaya pendidikan pemilu dan sosialisasi pemilu agar menghasilkan pemilih pemula yang cerdas.

Melihat adanya kondisi yang ada menjelang pemilu 2009, *Youth Forum* DIY sebagai gerbong remaja yang notabene menjadi pemilih pemula di kancah Pemilu 2009 sangatlah strategis sebagai salah satu kendaraan remaja dalam berpartisipasi dalam politik, khususnya dalam mengusung isu Kespro-Seksual (HIV-AIDS), Gender dan HAM.

*Youth Forum DIY* Bekerja sama dengan PKBI DIY yang menerbitkan *Buku Panduan Pemilih Pemula* (Kespro, HIV-AIDS, Gender dan HAM). Buku panduan ini akan didiskusikan dan disosialisasikan bersama remaja di DIY dan didorong untuk menjadi pernyataan sikap. Adanya pernyataan sikap para pemilih pemula yang tergabung dalam *Youth Forum* DIY dalam proses politik dimaksudkan untuk mengusung isu Kespro-Seksual (HIV-AIDS), Gender dan HAM. Dengan pernyataan sikap ini, diharapkan suara remaja dan kebutuhan mereka didengar oleh para calon pembuat kebijakan.<sup>31</sup>

#### **b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Selama periode 2004-2009, *Youth Forum* telah melaksanakan 2 kali *hearing*. Posisi *hearing* menjadi penting sebagai bentuk partisipasi remaja dalam proses penjangkaran aspirasi dari masyarakat. Menurut Diana Conyers, ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih memercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Ketiga, partisipasi menjadi urgen karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Kelompok Stdi Pemilu, op. cit., hal. 36

<sup>31</sup> Ada kesenjangan antara rencana dan realita. Karena keterbatasan waktu, belum dirumuskan pernyataan sikap. Namun, pernyataan sikap ini telah terwakili melalui petisi remaja yang merupakan hasil dari pengumpulan pesan remaja melalui pengisian 5000 *post card* oleh remaja. Proses penyusunan petisi ini dikelola oleh *youth forum* DIY dan *youth center* PKBI DIY dalam event *Stand Up and Take Action* yang dilakukan serentak secara internasional, yaitu kampanye Bangkit dan Berbuat dalam komitmen dunia mewujudkan MDGs. Isi petisi: 1)Memperjuangkan pendidikan kesehatan reproduksi masuk ke muatan lokal; 2) Memperjuangkan kesetaraan hak pendidikan bagi siswi yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan; 3)Fasilitas dan layanan publik yang ramah remaja; 4) Dilibatkannya remaja dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan dirinya; 5)Memperjuangkan pengakuan identitas, reduksi stigma & diskriminasi terhadap pekerja seks, remaja jalanan, serta LGBTQI; 6)Memperjuangkan hak akses layanan kesehatan bagi pekerja seks, remaja jalanan, serta LGBTQI yang tidak diskriminatif; 7)Dukung pengesahan Perda HIV dan AIDS Yogyakarta yang non diskriminatif terhadap pekerja seks, remaja jalanan, serta LGBTQI; 8)Tolak Raperda Gepeng (Gelandangan dan Pengemis); 9)Tolak Perda Larangan Pelacuran Bantul. (Dokumen Petisi Remaja DIY dalam *SUTA Campaign* 2008)

<sup>32</sup> Diana Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

Pada tahun 2007, perwakilan remaja dari youth forum melakukan hearing ke DPRD Provinsi DIY Adapun fraksi yang ditemui adalah Fraksi PKB, Fraksi PDI P, Fraksi PAN.<sup>33</sup> Perwakilan remaja dari 21 SMA di DIY ini mengusung topik “*Pemenuhan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Khususnya Kesehatan Reproduksi Remaja*”. Isu-isu yang disampaikan adalah empat isu utama yang diusung oleh *Youth Forum* DIY seperti telah dijabarkan di bagian awal yaitu: 1) Tuntutan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Masuk ke Pelajaran Sekolah, 2) Kesetaraan Hak Pendidikan bagi Siswi yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), 3) Memaksimalkan Fasilitas-Fasilitas Remaja, dan 4) Dilibatkannya Remaja dalam pembuatan Kebijakan

Tahun 2008, hearing dilakukan dengan DPRD Kota Yogyakarta.<sup>34</sup> Pada saat itu, perwakilan *youth forum* DIY bertemu dengan Ketua DPRD Kota, Waka 1 DPRD Kota, Waka 2 DPRD Kota, Ketua Fraksi PDIP, Waka Komisi 3, dan Anggota Komisi 1.

Penggalangan dukungan dari pihak legislatif atas empat isu yang diangkat oleh *Youth Forum* masih terus diupayakan secara konsisten. Tanggapan dari anggota dewan pun beragam. Sebagian sepakat dengan beberapa isu yang diusulkan, sebagian lagi menyerahkan isu ini kepada Komisi-1 yang dianggap lebih dekat dengan isu yang diusulkan.

Namun memang upaya untuk advokasi isu tersebut belum sampai pada adanya komitmen tindak lanjut secara tegas untuk dituangkan dalam bentuk kebijakan publik. Dukungan dari anggota legislatif yang bertemu dengan *youth forum* DIY masih bersifat kultural ataupun cenderung artifisial, seperti dukungan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh *Youth Forum* dalam bentuk kehadiran fisik dan sekadar membuka acara dengan pidato.

### **c. Pemerintah (melalui kebijakan publik)**

Kebijakan publik merupakan sebuah proses politik yang tidak berada dalam ruang kosong. Ia adalah hal yang paling pokok bagi kita untuk melihat bagaimana sebuah negara diselenggarakan. Artinya ketika kita melihat bahwa proses kebijakan publik disebuah tempat tidak baik, maka dapat dikatakan bahwa peneyelenggaraan negara di tempat tersebut juga tidak baik. Demikian pula sebaliknya. Kebijakan publik adalah sebuah relasi paling yang paling nyata dari dari relasi negara-rakyat. Dengan demikian, demokrasi dalam sebuah proses kebijakan publik adalah juga demokrasi bagi sebuah negara.<sup>35</sup>

#### **(1) Kovenan Hak Anak**

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) Internasional pada tanggal 5 Oktober 1990. Menurut KHA, batasan anak adalah sampai usia delapan belas tahun, sedangkan lewat dari itu masuk dalam kategori dewasa. Dengan demikian, sebagian besar dari kita para remaja ini masih termasuk dalam definisi anak. KHA memuat tiga hak dasar anak, yaitu hak hidup, hak kelangsungan hidup, dan hak perkembangan. Hak

---

<sup>33</sup> Press Release *Hearing* Youth Forum di DPRD Prov DIY 2007.

<sup>34</sup> Rekam Proses *Hearing* Youth Forum dengan DPRD Kota Yogyakarta 2008.

<sup>35</sup> Fauzi Ismail, dkk, *Libatkan Rakyat dalam Pengambilan Kebijakan: Mengais Partisipasi di Era Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Forum LSM DIY, 2005.



perkembangan mencakup perkembangan fisik, perkembangan mental (terutama yang menyangkut pendidikan), perkembangan moral dan spiritual, perkembangan sosial (misalnya memperoleh informasi yang tepat baik dari sumber nasional maupun internasional, menyatakan pendapat dan berserikat), serta perkembangan secara budaya. Hak untuk hidup dan kelangsungan hidup akan menjamin anak untuk terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh negara maupun orang dewasa sekitarnya.

Meskipun KHA sudah dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990, masih banyak kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa anak Indonesia belum sepenuhnya terlindungi. Bahkan masih ada beberapa peraturan yang terasa mendiskriminasi anak. Contohnya saja, UU No. 4 tahun 1997 tentang kesejahteraan anak. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum kawin. Ini berarti, kalau kita berusia 17 tahun dan sudah kawin, misalnya, berubah status menjadi dewasa berdasarkan hukum. Akibatnya, dia kehilangan haknya sebagai anak. (sumber: Konvensi Hak Anak, Panduan bagi Jurnalis, LSPP 2000).

Sementara itu, pelanggaran terhadap hak anak juga masih banyak terjadi di Indonesia, seperti juga yang dialami anak dan remaja di negara berkembang lain. Misalnya kasus buruh anak, yang dipekerjakan di tempat yang berbahaya bagi keselamatan mereka, dengan upah yang tidak memadai, dengan jam kerja lebih panjang dari seharusnya, serta tanpa jaminan kesejahteraan.

## **(2) Rancangan Undang-Undang Kepemudaan<sup>36</sup>**

Sejak tahun 1990 pemerintah meratifikasi kovenan hak anak dan tahun 1994 menandatangani *POA International Conference on Population and Development* (ICPD), baru setelah tahun 2004 mulai dilakukan pembahasan secara serius mengenai RUU Kepemudaan yang merupakan produk kebijakan yang menjadi bukti komitmen pemerintah atas isu remaja. Target yang ingin dicapai oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Rancangan Undang-Undang Kepemudaan dapat selesai pada September 2009.

Secara garis besar, RUU tersebut berisi mengenai perlindungan dan pemberdayaan pemuda. Adanya RUU Kepemudaan tersebut, diharapkan dapat mempercepat sirkulasi kepemimpinan, baik di tingkat daerah maupun nasional, yang selama ini mandek.

Namun penyusunan RUU Kepemudaan tidak terlepas dari kontroversi berkaitan dengan istilah pemuda yang dipakai (bukan remaja), maupun berkaitan dengan batasan kategori usia pemuda. Dalam RUU batasan usia pemuda adalah antara 18-35 tahun dengan asumsi supaya tidak bertabrakan dengan UU Perlindungan Anak. Akan tetapi, pertimbangan sebagian besar kalangan yang aktif di organisasi kepemudaan, usia diatas 35 tahun masih aktif dan produktif mengikuti berbagai kegiatan kepemudaan, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Angkatan Muda Pemuda Indonesia, Karang Taruna dan sebagainya. Sementara itu pihak yang menggunakan *term* remaja merasa RUU ini belum sepenuhnya mengakomodasi kelompok remaja yang berusia antara 10-24 tahun.

Nasib RUU tentang Kepemudaan yang menjadi salah satu dari 284 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2004-2009 dan telah menjadi keputusan antara pemerintah

---

<sup>36</sup> Diolah dari berbagai sumber

dan DPR kian tak jelas. Ketidakjelasan ini tergambar pada lamanya proses keluar surat pengantar presiden (surpres) sebagai syarat pengajuan dan pembahasan di DPR. Padahal, RUU ini termasuk yang diusulkan oleh pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM untuk jadi RUU yang diprioritaskan dibahas tahun 2008.<sup>37</sup>

**d. NGO (Youth Center PKBI DIY)**

Keberadaan *Youth Center* di masing-masing PKBI daerah berawal dari dana yang diberikan oleh UNFPA (*United Nations Population Fund*, suatu badan PBB yang mengurus masalah kependudukan). Pendirian *Youth Center* ini oleh dilakukan oleh PKBI ini, melakukan kerja bersama dengan BKKBN serta berbagai instansi yang terkait, misalnya Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, dan lain-lain.

*Youth center* PKBI DIY, memiliki pelayanan seperti konseling, pemeriksaan medis, diskusi, ceramah, kursus keterampilan, internet, siaran radio, serta penerbitan buletin dan kinerja riset. Dengan dana mandiri, juga memiliki program *peer education* dengan visi untuk membentuk remaja bertanggung jawab.<sup>38</sup>

**e. Media Massa (Koran Lokal DIY)**

Tabel 7. Media Massa dan Kolom Remaja

Media	Rubrik/ Kolom	Peran Remaja
Kedaulatan Rakyat	<i>Kaca</i>	Aktif terlibat sebagai reporter dan redaksi
Harian Jogja	Konseling dan Artikel Remaja	Tidak terlibat aktif sebagai reporter dan redaksi

**f. Pemerintah (FKPKRR)**

Forum Kerjasama Program Kesehatan Reproduksi Remaja (FKPKRR) merupakan forum yang dibentuk pada tahun 2007 berdasarkan SK Gubernur DIY Nomor 51/KEP/2007. Pembentukan forum ini bertujuan untuk menangani persoalan-persoalan kesehatan reproduksi remaja dengan melaksanakan program-program yang terpadu dan paripurna.

Anggota FKPKRR berjumlah 33 lembaga yang meliputi unsur-unsur dinas, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat serta organisasi sosial kemasyarakatan. *Youth forum* tergabung dalam FKPKRR sehingga secara langsung dapat melakukan komunikasi dan memberikan masukan terhadap program-program pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja pada khususnya. Berikut ini adalah beberapa lembaga pemerintah yang tergabung dalam FKPKRR:

Tabel 8. Lembaga Pemerintah dalam FKPKRR

---

<sup>37</sup> Pemerintah tak serius tuntaskan RUU kepemudaan, <http://yusufsupendi.multiply.com/journal/item/11>

<sup>38</sup> Profil PKBI DIY

No	Lembaga	Ruang lingkup prioritas kegiatan
1.	<b>BP4</b>	Kegiatan yang sudah dilakukan oleh BP4 adalah “Pembekalan dan Penyuluhan kepada Calon Pasangan Pengantin (SusCatin)” yang berjejaring dengan Departemen Agama, Puskesmas dan PLKB tiap Tri Wulan (satu Tahun 4 kali). Secara garis besar, ruang lingkup kegiatan yang paling kuat dilakukan selama ini adalah dalam koridor preventif. Yang bertujuan sebagai pencegahan penyakit melalui penyuluhan untuk semua calon pengantin di tiap kecamatan di DIY.
2.	<b>DEPAG DIY</b>	Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh DEPAG, maka lembaga ini paling kuat bergerak dalam ruang lingkup kegiatan preventif. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah: a. Pembekalan dan penyuluhan kepada calon pasangan pengantin (SusCatin) tiap 3 bulan sekali untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan. b. Pendidikan pra nikah bagi remaja usia Nikah setiap tahun sekali 40 orang masing—masing kab/kota untuk remaja masjid, siswa S:LTA, kelas III MAN, SMU dan SMK.
3.	<b>Dinas Kesehatan Provinsi DIY</b>	Adapun kegiatan yang dilakukan secara garis besar berupa sosialisasi, konseling, pelatihan, sosialisasi, jambore dan jejaring.
5.	<b>BPPM (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat)</b>	Mayoritas kegiatan KPP DIY adalah sosialisasi tentang kespro pada remaja. Selain itu terdapat kegiatan yang bersifat rehabilitatif yaitu pendampingan yang akan dilakukan apabila ada laporan dari remaja yang menjadi korban.
6.	<b>BKKBN DIY</b>	Mayoritas kegiatan BKKBN adalah: Pelatihan, sosialisasi, pembinaan dan pengembangan program KRR, temu remja, pengembangan program KRR melalui pramuka dan Pontren dengan sasaran adalah remaja sekolah dan non sekolah. Pelatihannya berupa pelatihan pendidik sebaya dan pelatihan KRR bagi remaja jalanan.

### g. Jaringan Kerja Internasional

#### (1) *International Youth day*<sup>39</sup>

Sejak tahun 2005, peringatan *international youth day* sudah dilaksanakan oleh remaja di DIY, yang dalam hal ini diorganisir oleh *Youth Center* PKBI DIY. Kegiatan yang dilakukan berupa diskusi publik, pementasan seni, yang diikuti oleh perwakilan dari remaja sekolah, remaja jalanan, *hearing*, dan sebagainya. Mulai tahun 2007, penyelenggaraan peringatan *international youth day*, dilakukan oleh *Youth Forum DIY*.

#### (2) *Youth Forum International (IPPF)*<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Gagasan tentang pentingnya remaja memiliki satu hari khusus bermula dari Konferensi Dunia bagi para menteri yang bertanggung jawab menangani masalah remaja yang diselenggarakan di Lisbon pada tanggal 8-12 Agustus tahun 1998. Para menteri ini mengusulkan agar hari terakhir konferensi ini, ketika beberapa kesepakatan mengenai remaja sudah tercapai, diperingati sebagai Hari Remaja Sedunia. Akhirnya pada bulan Desember 1999, Sidang Umum PBB mengeluarkan resolusi yang menetapkan tanggal hari perayaan bagi remaja tersebut mulai tahun 2000. Sidang Umum merekomendasikan perlu adanya kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat sehubungan dengan peringatan tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan Program Aksi bagi Remaja tahun 2000 dan seterusnya. (Guntoro Utamadi, PKBI Pusat. <http://www.geocities.com/guntoroutamadi/artikel-youthday.html>)

<sup>40</sup> IPPF sudah mengakui keberadaan youth parliament sebagai members assembly di Prague, November 1998, untuk duduk bersama para orang dewasa, berdebat, berbagi ide dan pengalaman, untuk kemudian menghasilkan suatu Youth Manifesto – sebuah plan of action bagi IPPF dan pengembangan strategi lima-

Sebagai organisasi swadaya masyarakat, IPPF jelas punya struktur organisasi yang berjenjang, mulai dari PKBI sebagai salah satu member, tingkat regional sampai internasional. Keberadaan youth member dalam organisasi IPPF bukan hanya dalam bentuk youth manifesto, tapi juga dalam setiap level strukturalnya. Sejak 1998, IPPF mewajibkan anggota Governing Council-nya terdiri atas 20% youth representatives. Governing Council (sering disingkat sebagai GC) itu adalah badan tertinggi IPPF tempat semua kebijakan IPPF dibahas, wadah IPPF menentukan strateginya, dan juga wadah tempat pengambilan keputusan tertinggi dalam lingkup organisasi IPPF ini. Hal ini juga diadaptasi di PKBI DIY dengan perwakilan remaja dalam Pengurus Harian Daerah.

Secara struktural, terdapat keterkaitan paralel antara *Youth Forum* di tiap tingkatan wilayah kerjanya dengan PKBI. *Youth Forum* di Kabupaten/ Kota paralel dengan PKBI tingkat Cabang; *Youth Forum* DIY dengan PKBI DIY. Masing-masing PKBI di daerah (tingkat Provinsi) memiliki *youth representative* yang akan mewakili daerahnya di level nasional (PKBI Pusat Jakarta), di level internasional, PKBI yang tergabung dalam IPPF, memiliki *youth representative* dari masing-masing negara yang dipilih untuk mewakili Indonesia di tingkat Internasional.<sup>41</sup>

Secara umum kesemua aktor tersebut menjalankan fungsi-fungsi berikut ini: Agrerasi kepentingan; Artikulasi kepentingan; Pendidikan politik; Sosialisasi politik; Komunikasi politik. Sedangkan Strategi yang digunakan untuk menjamin optimalitas perwakilan dapat dikategorisasikan menjadi dua: 1) Struktural: Demonstrasi (aksi non kekerasan), metode ini merupakan salah satu sarana untuk menyatakan tuntutan/kepentingan. Sarana ini banyak digunakan oleh kelompok anomik, Perwakilan langsung: *hearing*, sarana penyamaan aspirasi yang bersifat formal, dan Lobi – Negosiasi; 2) Kultural: Penggunaan instrumen media

---

tahunan oleh remaja itu sendiri. Ada dua hal yang mendasar bagi IPPF terhadap eksistensi remaja, yaitu kerjasama remaja-dewasa untuk memastikan remaja memperoleh informasi yang dibutuhkan; dan memastikan remaja bisa berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan sosialnya. Menjadi youth member dalam lingkungan IPPF dan PKBI memberi kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi. Keberadaan youth manifesto telah menjamin hak saya dan teman-teman saya lainnya diseluruh dunia untuk mendapat informasi dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan remaja. Youth manifesto adalah program atau kebijakan internasional yang dibuat dari, oleh dan untuk remaja. (Roellya Ardhyaning Tyas, relawan Mitra Citra Remaja PKBI Jabar, <http://www.geocities.com/guntoroutamadi/artikel-youthday.html>.)

<sup>41</sup> Dalam pemilihan *youth representative* di tingkat Daerah (Provinsi) sebenarnya problematik, karena terdapat keterputusan struktural dari anggota *Youth Forum* DIY yang merupakan siswa SMA, namun *youth representative* yang terpilih adalah salah satu remaja (usia maksimal 24 tahun) yang merupakan relawan PKBI DIY yang tidak lagi secara struktural berperan aktif dalam *Youth Forum* DIY. Pertimbangan yang digunakan adalah, kinerja *youth representative* daerah yang akan mewakili di tingkat nasional, yang tidak memungkinkan dilakukan oleh remaja usia SMA dari segi waktu dan kapasitas. Namun, poin keterwakilan dari sisi usia tetap menjadi suatu batasan ketat yang tidak dapat diganggu gugat. Akan tetapi, dari sisi kultural, *youth representative* sangat erat kaitannya dengan *Youth Forum* DIY, karena segala isu yang akan diaspirasikan di level nasional dan internasional, tetap tidak terlepas dari isu yang diusung *Youth Forum* DIY, ataupun jika terdapat perkembangan isu di level nasional dan internasional, komunikasi dilakukan antara Youth Representative dengan Youth Forum DIY. (Wawancara dengan Setiana Martha Dewi, *Youth Representative* DIY, 10 Juni 2009)

## Penutup

### 1. Kasus berhasil di tempat lain: Filipina

Menurut kantor statistik Filipina, total populasi negara tersebut sebanyak 82,6 juta di tahun 2004. Usia muda dari umur 15 sampai 30 tahun sekitar 28,43% dari total populasi. Di Filipina, sejarah panjang politik mereka memberikan ruang yang sangat besar kepada remaja dalam politik. Identitas remaja telah diakomodasi secara formal oleh pemerintah. Menurut “Youth in Nation-Building Act” (Republik Act 8044), remaja didefinisikan sebagai : “...masa kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan seseorang dari masa anak-anak hingga puncak kedewasaan, mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya. Diperkirakan berusia 15 hingga 30 tahun.” Namun, definisi remaja tidak sama di setiap institusi seperti dalam tabel berikut ini:

Pemerintah	Definisi
National Youth Commission (NYC)	15-30 tahun
Departement of Labour and Employment (DOLE)	15-24 tahun
Departement of Health (DOH)	15-21 tahun
Departement of Education, Culture dan Sports (DECS)	7-18 tahun
Departement of Social Welfare and Development (DSWD)	7-18 tahun

Dari sisi isu, dari hasil Survey Nasional yang dilakukan oleh *The National Youth Commission* (NYC) menunjukkan area yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah atas remaja :

Respon	Persen
Kampanye melawan narkoba-terlarang	67
Pemberian beasiswa	63
Menyediakan lapangan pekerjaan	41
Promosi terhadap sektor olahraga	37
Menyediakan layanan kesehatan	34
Perlindungan remaja terhadap kekerasan dan diskriminasi	34
Membantu minat mereka yang ingin usaha mandiri	24

Sumber : SWS 1996

Selain itu terdapat beberapa institusi perwakilan remaja yang terlibat dalam proses formal politik yaitu: a) *Sangguniang Kabataan* (SK), b) Perwakilan Remaja dalam Pemerintah Nasional, c) *The National Youth Commission* (NYC), d) *National Youth Parliament* (NYP), e) *National Anti-Poverty Commission* (NAPC), dan f) *National Movement of Young Legislators* (NMYL)

### 2. Multiplikasi: Yogyakarta sebagai contoh berhasil di Indonesia

Metode *best practices* (contoh berhasil sebagai inspirasi atau model) sudah tak asing dilakukan di negeri ini meskipun belum masif. Dengan keberadaan youth forum di DIY, dapat menjadi sebuah pengalaman yang dapat dilakukan multiplikasi di daerah-daerah lain. Terlebih dengan konteks perkembangan masyarakat sipil di Indonesia, menjadi sebuah

kondisi yang semakin memungkinkan bagi remaja untuk mengorganisir diri dan menyuarakan kepentingannya.

### **3.Rekomendasi**

*Mainstreaming* isu remaja harus terus dilakukan. Pelibatan remaja tidak hanya dilakukan dalam isu spesifik remaja, tetapi dalam isu yang lain supaya partisipasi remaja tidak bersifat sektoral. Organisasi-organisasi patron, harus mulai melibatkan remaja dalam program-programnya. Asumsinya, dari berbagai ragam isu yang diperjuangkan secara aktif oleh remaja, suatu saat pasti akan menemui *cross cutting* dari isu-isu yang berserakan sebagai sebuah isu remaja secara umum.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Almond, Gabriel A. *Kelompok Kepentingan dan Partai Politik*, dalam Mohtar Mas'ood, (ed), *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.

Conyers, Diana, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

Setiawan, Bambang (ed), *Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.

Kelompok Studi Pemilu, *Buku Pintar Pemilu*, tidak dipublikasikan, Fisipol UGM, 2009.

Ismail, Fauzi (et.al), *Libatkan Rakyat dalam Pengambilan Kebijakan: Mengais Partisipasi di Era Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Forum LSM DIY, 2005.

### **Makalah**

Azizah, Nur, *Peta Pemikiran tentang Perempuan dan Politik*, Program S3 Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Politik, tidak dipublikasikan, 2008.

### **Jurnal dan Buletin**

Buletin Embrio, edisi 28, Desember 2008, PKBI DIY, 2008.

Eko, Sutoro, *Daerah Budiman: Prakarsa dan Inovasi Lokal Membangun Kesejahteraan*, IRE's Insight Working Paper/Eko/III/February/2008.

### **Situs internet**

Guntoro Utamadi, PKBI Pusat/Irwan Julianto, dari Taipei, Taiwan).  
<http://www.geocities.com/guntorutamadi/artikel-remaja-asia-beresiko.html>

Pemerintah *tak serius tuntaskan RUU kepemudaan*,  
<http://yusufsupendi.multiply.com/journal/item/11>  
<http://www.un.org/esa/socdev/unyin/youthindicators1.htm>  
Standford encyclopedia of philosophy, political representation, <http://plato.stanford.edu>  
Website pemerintah provinsi DIY

### **Lain-lain**

Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY versi 07 Juni 2007, pukul 14.00 WIB, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM, 2007.

Dokumen Petisi Remaja DIY dalam *SUTA Campaign* 2008)

Dokumen Press Release *Hearing Youth Forum* di DPRD Prov DIY 2007.

Dokumen Rekam Proses *Hearing Youth Forum* dengan DPRD Kota Yogyakarta 2008.

Konvensi Hak Anak, Panduan bagi Jurnalis, LSPP, 2000

Profil PKBI DIY